

PEMKO SUDAH LAKUKAN BERBAGAI UPAYA WUJUDKAN PEKANBARU BEBAS *STUNTING*



Sumber gambar:

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/21082024/70251-news-pemko-sudah-lakukan-.jpeg

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Kota Bertuah bebas *stunting* atau kasus gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi. Penanganan kasus *stunting* sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah guna membangun generasi bangsa yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Di Kota Pekanbaru, pencegahan dan penanganan *stunting* di bawah kepemimpinan Pj Walikota Risnandar Mahiwa S.STP M.Si, dilakukan dari hulu yang memerlukan sinergisitas dari seluruh stakeholder terutama yang tergabung dan konvergensi penanganan *stunting* dan juga seluruh masyarakat bahkan remaja dan orang tua yang merupakan salah satu potensi resiko *stunting*.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasuton ST M.Si yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) baru-baru ini menyebutkan, ada beberapa hal pemicu terjadinya kasus stunting di wilayah setempat.

Antara lain akibat rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan sehingga nutrisi yang masuk tidak optimal. Hal ini bisa terjadi karena pola makan, pola

asuh, penyakit penyerta dan ekonomi. Selain itu juga karena masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi seimbang.

"Ada juga di antaranya yang disebabkan sakit infeksi berulang, buruknya fasilitas sanitasi serta minimnya akses air bersih dan kurangnya kebersihan lingkungan," ucapnya didampingi Kepala Dinas Dalduk KB Drs. H. Muhammad Amin M.Si yang juga Sekretaris TPPS Kota Pekanbaru. "Inilah yang kita lakukan penyuluhan ke lapangan agar masyarakat mengetahui penyebab *stunting* ini," ulas Indra Pomi.

Ia menyampaikan, sejak awal Pemerintah Pusat menginstruksikan daerah agar memprioritaskan penanganan *stunting* di daerah masing-masing, banyak aksi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Aksi dimakdus seperti membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Kemudian melakukan audit kasus *stunting* dan pelaksanaan program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

"Untuk program ini (BAAS), kita melibatkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk juga jajaran Forkopimda untuk menjadi bapak asuh anak *stunting*. Pihak swasta dan BUMN juga turut kita libatkan. Sehingga penanganan *stunting* ini bisa berkelanjutan dan diatasi bersama," paparnya.

Di samping itu, lanjut Indra Pomi, juga dilaksanakan pengawalan intervensi serentak, pendampingan kepada keluarga berisiko *stunting* dengan memberikan KIE, fasilitasi layanan rujukan, fasilitasi bansos, membentuk DASHAT (Dapur Sehat Atasi *Stunting*) serta menggelar Rembuk *Stunting* Kota Pekanbaru dan melaksanakan Mini Lokakarya di setiap kecamatan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

"Alhamdulillah, dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, hasilnya kasus *stunting* di Pekanbaru sudah menurun," ungkapnya. Hasil prevalensi *stunting* di Pekanbaru di tahun 2013 lalu yang mencapai 34,7 persen, di tahun 2023 sudah turun menjadi hanya 8,7 persen. Angka ini berpedoman pada Riset Kesehatan Dasar, Survei Status Gizi Indonesia dan Survei Kesehatan Indonesia, sambung Indra Pomi. Berdasarkan data terakhir Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru, saat ini kasus *stunting* di Pekanbaru berjumlah 227 kasus. Dimana 165 kasus di antaranya diintervensi melalui pelaksanaan program BAAS.

Sumber berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-sudah-lakukan-berbagai-upaya-wujudkan-pekanbaru-bebas-stunting>, "Pemko Sudah Lakukan Berbagai Upaya Wujudkan Pekanbaru Bebas *Stunting*", 21 Agustus 2024;

2. <https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/pemko-pekanbaru-gencar-wujudkan-kota-bebas-stunting-kasus-turun-drastis-hingga-87-persen>, “Pemko Pekanbaru Gencar Wujudkan Kota Bebas Stunting, Kasus Turun Drastis Hingga 8,7 Persen”, 21 Agustus 2024; dan
3. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/113906/2024/08/22/wujudkan-pekanbaru-bebas-stunting-ini-sejumlah-upaya-yang-dilakukan-pemko#sthash.nV78BZmC.dpbs>, “Wujudkan Pekanbaru Bebas Stunting, Ini Sejumlah Upaya yang Dilakukan Pemko”, 22 Agustus 2024.

Catatan:

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pengertian *stunting* yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Sedangkan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, di informasikan bahwa kegiatan prioritas rencana aksi meliputi:

- a) penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- b) pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c) pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- d) surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
- e) audit kasus *Stunting*;
- f) perencanaan dan penganggaran;
- g) pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menginformasikan bahwa terdapat 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu:

- 1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- 2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program Bangga Kencana berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu fokus dari program Bangga Kencana, yaitu penurunan *Stunting* yang juga menjadi program strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI). Terdapat 4 (empat) kebijakan program Bangga Kencana yaitu:

- 1) Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi berupa peningkatan kualitas dan pemanfaatan data program bangga kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah;
- 2) Meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komperhensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran; dan
- 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau